

JURNAL

EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (JEPP)

Volume : 4. NO. 01, JANUARI - JUNI 2011



ANALISIS SEKTOR UNGGULAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
KOTA LUBUKLINGGAU
Taufik Hidayat, Lizar Alfansi, Yusnida

PENGARUH KESETARAAN GENDER
TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH
(Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)
Tahun 2000-2009
Susiani, Handoko Hadiyanto, Bambang A Hermanto

STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN PABRIK MINYAK GORENG
DI PROVINSI BENGKULU
Ardi Muhidin, M. Ridwan, Edy RahmantoTH

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
Eva Juniarti, Ridwan Nurazi, Sunoto

EFEKTIVITAS DAN DAMPAK PROGRAM PERKUATAN
PINJAMAN MODAL BERGULIR EKONOMI KERAKYATAN
TERHADAP KOPERASI WANITA DI KOTA BENGKULU
Yenita Syaiful, Heri Sunaryanto, Ir Lela Rospinda

STRATEGI PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL KAIN BESUREK DI KOTA BENGKULU
Hengky Pratama, Retno Agustina Ekaputri dan Merri Anitasari

KESEDIAAN MEMBAYAR PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM
DALAM KAJIAN SISTEM TRANSPORTASI KOTA BENGKULU
(TERMINAL BETUNGAN KE TERMINAL SUNGAI HITAM)
Indrawansyah Putra Utama, Ketut Sukiyono, Bernardin

THE ANALYSIS OF EFFICIENCY
IN THE USE OF PRODUCTION FACTORS OF SELF EMPLOYMENT
ON EMPING MELINJO IN BENGKULU CITY
Syamsul Bachri

PENERBIT PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BENGKULU

Gedung S Jln. Raya Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
Telp 0736 - 28481 Fax : 0736 - 28481 email : mpp_feunib@yahoo.com

**PENGARUH KESETARAAN GENDER
TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH
(Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)
Tahun 2000-2009**

By:
Susiaini, Handoko Hadiyanto, Bambang A Hermanto

ABSTRACT

The research aims to know the impact of gender equality in the fields of education, health and manpower on the economy of regencies and employment to the local economy in Musi Rawas district (period of 2000-2009).. Models estimated using regression. Method using of literature study and observation. The result of the research shows that gender equality in the fields of education, health and opportunities for employment has positive impact on the economy of Musi Rawas regency. Access discrimination toward women on education, health and opportunities for employment can obstruct regional economic development. More than on economic purpose, gender equality was part of on honor to human rights and also was a society empowerment for both men and women to obtain equality of acces to, participation in, and possess to control and the equality of benefit in development.

Key words: Development impact, gender equality, regional economy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja terhadap perekonomian kabupaten dan kerja untuk ekonomi lokal di kabupaten Musi Rawas (periode 2000-2009) .. Model diperkirakan menggunakan regresi. Metode menggunakan studi literatur dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja berdampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Musi Rawas Akses diskriminasi terhadap perempuan pada pendidikan, kesehatan dan opportunities untuk bekerja dapat menghambat pembangunan ekonomi daerah. Lebih dari pada tujuan ekonomi, kesetaraan gender merupakan bagian dari pada kehormatan untuk hak asasi manusia dan juga pemberdayaan masyarakat bagi pria dan wanita untuk memperoleh kesetaraan akses terhadap, berpartisipasi dalam, dan memiliki untuk mengontrol dan kesetaraan manfaat dalam pembangunan.

Kata kunci: Dampak pembangunan, kesetaraan gender, perekonomian daerah

PENDAHULUAN

Sebagai elemen dari kebijakan pembangunan nasional, upaya mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dimana sebelumnya telah pula tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS 2000-2004), yang dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan PUG sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen, pemerintah provinsi maupun di

kabupaten/kota, melakukan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan serta aspirasi perempuan dalam pembangunan.

Meski berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki sudah dimiliki namun pada kenyataannya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di semua bidang masih tetap berlangsung. Diskriminasi itu terjadi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, seperti: bidang ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan berbagai sektor publik serta lingkup keluarga (Meutia ,2007).

Hal yang paling merugikan dari ketidaksetaraan gender adalah menurunnya kualitas kehidupan. Dengan menahan akumulasi sumberdaya

manusia di rumah dan di pasar tenaga kerja, serta dengan sistematis mengecualikan perempuan atau laki-laki dari akses ke sumberdaya, jasa publik, atau aktifitas produktif, maka diskriminasi gender mengurangi kapasitas suatu perekonomian untuk tumbuh serta mengurangi kapasitas untuk meningkatkan standar kehidupan (World Bank, 2000).

Meninjau data Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tahun 2005-2008, nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia adalah 65,1. Di tingkat nasional, Propinsi D.I Yogyakarta menempati peringkat pertama dengan nilai IPG adalah 70,2, diikuti DKI Jakarta peringkat ke dua dengan nilai IPG 68,1, Bali peringkat ke tiga dengan nilai 66,0, Sulawesi Utara peringkat ke empat dengan nilai 64,9, dan Bengkulu peringkat ke lima dengan nilai IPG 63,9, sedangkan Sumatera Selatan peringkat ke 24 dengan nilai IPG 58,5 masih berada dibawah nilai IPG nasional. Mengutip pernyataan UNDP tahun 2005, kesenjangan antara nilai IPM dan IPG menunjukkan, bahwa keberhasilan pembangunan secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan dalam pembangunan gender.

Mengutip pernyataan UNDP tahun 2004, bahwa suatu daerah dengan PDRB perkapita yang tinggi, tidak selalu memperlihatkan nilai IPG yang tinggi juga; demikian sebaliknya, IPG yang tinggi tidak juga selalu berimbang pada PDRB perkapitanya tinggi. Namun demikian, ditemukan pula beberapa daerah yang memiliki kesesuaian antara PDRB perkapita dengan IPG. Di Kabupaten Musi Rawas sendiri IPGnya termasuk paling rendah diantara kabupaten/kota seprovinsi sumatera selatan apakah akan sama dengan PDRB perkapitanya? Hal ini kiranya sangat menarik untuk membahas lebih lanjut bagaimana pengaruh pembangunan gender terhadap perekonomian di Kabupaten Musi Rawas.

Rumusan Masalah

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan adalah pembangunan gender. Hasil-hasil pembangunan yang semula ditujukan untuk memberi manfaat menyeluruh kepada masyarakat, perempuan maupun laki-laki, pada kenyataannya belum bisa dinikmati secara

merata dan adil antara perempuan dan laki-laki. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan tidak terlepas dari permasalahan kesetaraan dan keadilan gender. Pembangunan berperspektif *Gender* memiliki cakupan yang Luas, untuk keperluan penelitian ini, focus masalah adalah "Bagaimana Pengaruh Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenagakerjaan Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten Musi Rawas?"

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan terhadap perekonomian daerah kabupaten Musi Rawas.

KAJIAN PUSTAKA

Pandangan Ekonomi Baru Tentang Pembangunan

Menyadari kekeliruan dekade-dekade terdahulu, yang mengagungkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan, Bank Dunia pada salah satu publikasi resminya yakni *World Development Report* yang terbit pada tahun 1991 melontarkan pernyataan tegas, bahwa: "Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan.

Kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi. Namun, yang dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang lebih tinggi hanya merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Banyak hal lain yang juga harus diperjuangkan, yakni: pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan *individual* dan pelestarian ragam kehidupan budaya" (*World Bank*, 1991 dalam Todaro, 2003).

Dalam pandangan kebijakan *Asian Development Bank*, pengakuan atas perlunya memperbaiki status perempuan dan meningkatnya potensinya di dalam pembangunan tak lagi hanya dipandang dari masalah hak asasi manusia atau keadilan sosial saja. Sementara upaya kesetaraan gender masih tetap kuat tertanam dalam kerangka fundamental hak asasi manusia, investasi untuk perempuan kini juga diakui menentukan dalam pencapaian

tujuan pembangunan yang berkesinambungan. Peningkatan investasi bagi perempuan, menghasilkan perempuan lebih terdidik dan lebih sehat, akan menyediakan fondasi sumberdaya manusia yang baik untuk pembangunan ekonomi (ADB,1998)

Penduduk Sebagai Modal Pembangunan

Secara normatif telah diketahui, bahwa manusia merupakan subyek pembangunan dan bahwa pembangunan dilaksanakan untuk manusia dan oleh manusia pula. Tiga dimensi manusia dalam pembangunan, yaitu: sebagai pengambil keputusan, sebagai pelaksana dari keputusan, dan sebagai penerima hasil pelaksanaan dari keputusan yang telah dibuat, perlulah dilihat sebagai satu kesatuan yang holistik (Hasibuan, 1996)

Mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka memberdayakan masyarakat (semua orang), perempuan dan laki-laki, untuk meningkatkan taraf hidup (*World Bank*, 2000)

Kesetaraan *gender* merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Keadilan *gender* adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap wanita dan lakilaki. (Inpres No. 9 Tahun 2000).

Dengan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, maka perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumberdaya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumberdaya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Kesetaraan Gender dan Pembangunan

Diskriminasi berdasarkan *gender* masih terjadi pada berbagai aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan

yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Kesetaraan *gender* sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut.

Kesetaraan *gender* merupakan persoalan pokok pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesetaraan *gender* akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, kesetaraan *gender* adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka (*World Bank*, 2000).

Kesetaraan *gender* merupakan kesamaan peluang bagi wanita dan laki-laki untuk memperoleh hak-hak dalam hukum, akses terhadap sumberdaya dan berinspirasi. Ranah Kesetaraan *Gender*, dan Kinerja Ekonomi Agregat. Kesamaan hak dalam hukum diartikan sebagai kesamaan hak yang diatur dalam bentuk peraturan-peraturan negara ataupun peraturan lainnya. Kesamaan akses dalam sumberdaya merupakan kesamaan peluang untuk memperoleh sumberdaya produktif, termasuk di dalamnya kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan, memperoleh pekerjaan, maupun kesetaraan upah kerja maupun non agrikultur

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian dan kerangka analisis yang telah diuraikan, maka jenis penelitian bersifat deskriptif, kemudian disusun sebuah model matematis yang dapat memberi penjelasan terhadap *Question research* yang diajukan. Dalam menyusun dan menetapkan model yang akan digunakan, penelitian ini mengadopsi model dari Esteve dan Volart (2004) dan pengolahan variabel seperti yang pernah digunakan oleh Samosir (2004), dengan beberapa penyesuaian. Pokok dari kerangka pemikiran yang disederhanakan dalam bentuk model adalah kesetaraan gender berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

Dengan demikian, variabel-variabel bebas (*Independent Variables*) dari model adalah suatu

ukuran/indikator kesetaraan gender yang ditunjukkan oleh Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG), yaitu IKKG bidang Pendidikan, IKKG bidang kesehatan dan IKKG bidang ketenagakerjaan; sedangkan variabel tidak bebas (*dependent variable*) adalah indikator perekonomian daerah yang ditunjukkan oleh PDRB per Kapita Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2009 di Kabupaten Musi Rawas

Definisi Operasional

1. Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB per Kapita), adalah nilai barang dan jasa rata-rata yang dihasilkan oleh penduduk di suatu daerah / wilayah dalam waktu satu tahun. PDRB per Kapita ini menunjukkan pula tingkat pendapatan rata-rata penduduk dalam waktu satu tahun.
2. Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun ke Atas, adalah banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dibandingkan dengan seluruh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Ukurannya persen.
3. Angka harapan hidup merupakan indikator bidang kesehatan yang dapat menunjukkan derajat atau status kesehatan penduduk dengan angka harapan hidup
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dari hasil studi pustaka dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskripsi dan kuantitatif. Melalui kedua metode analisis tersebut pada tahap analisis data dan hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan mudah dipahami.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan

Hasil regresi pada Tabel 4.18 tampak bahwa nilai t-test = 1,6348 dan hasil p-value = 0,153205. Dengan membandingkan antara taraf nyata dengan p-value (dalam istilah Excel adalah significance). Jika taraf nyata (5%) < dari p-value (significance) = 0,153205, maka kesimpulannya yaitu kesetaraan gender bidang

pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas. Dengan demikian hasil uji hipotesa adalah menolak H_0 dan menerima H_1 Artinya, secara parsial tidak ada pengaruh signifikan Kesetaraan dan Keadilan Gender Bidang Pendidikan terhadap Perekonomian Kabupaten Musi Rawas.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaruh kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan (kesetaraan gender melek huruf) terhadap perekonomian 59 Kabupaten Musi Rawas adalah tidak signifikan. Tidak signifikannya pengaruh kesetaraan gender bidang pendidikan terhadap perekonomian Kabupaten Musi Rawas dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masih tingginya kesenjangan angka melek huruf penduduk laki-laki dan penduduk perempuan yang terlihat pada hasil IKKG melek huruf.

Interval angka IKK melek huruf (pendidikan) masih berkisar antara 0,191-0,371 selama 10 tahun terakhir. Angka ini masih jauh dari angka 1 (satu) yang menunjukkan tingkat kesetaraan pendidikan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

IKKG melek huruf (pendidikan) yang rendah salah satu penyebabnya adalah terbatasnya ketersediaan sarana pendidikan (bangunan sekolah) terutama di wilayah pedesaan, karena Kabupaten Musi Rawas sendiri masih banyak desa-desa yang sulit dikangkau (desa terpencil). Faktor lain, meski tersedia bangun sekolah namun jarak yang jauh dari lokasi tempat tinggal menjadi pertimbangan keamanan bagi penduduk perempuan.

Faktor kurangnya pengajar untuk daerah-daerah terpencil, turut menjadi pemicu rendahnya pendidikan Kabupaten Musi Rawas secara umum. Di samping itu, faktor social budaya di masa-masa lalu turut andil dalam pencapaian pendidikan di Kabupaten Musi Rawas. Masih berkembangnya pola pikir masyarakat awam kebanyakan, yang memomorduakan pendidikan anak perempuan dibandingkan pendidikan anak laki-laki, membuat kesenjangan pendidikan di Kabupaten Musi Rawas masih cukup tinggi.

Hingga tahun 2009 data statistik Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa penduduk

perempuan usia 15 tahun ke atas yang mengalami buta huruf masih lebih tinggi dibanding kaum laki-laki. Perempuan yang buta huruf mencerminkan bahwa kualitas dan kesempatan pendidikan masih tertinggal dibanding laki-laki. Padahal, untuk menjadi agen perubahan, perempuan harus mempunyai akses yang adil terhadap kesempatan pendidikan. Melek Huruf bagi perempuan merupakan kunci untuk memberdayakan perempuan agar bisa berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan meningkatkan status ekonominya.

Memperluas kesempatan pendidikan bagi perempuan, akan menghasilkan perempuan yang terdidik. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan, perempuan lebih dapat berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. Makin tinggi tingkat pendidikan perempuan, memperbesar peluang baginya untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena, perempuan yang berpendidikan dapat menjadi lebih produktif jika dibandingkan yang tidak berpendidikan. Tingkat produktifitas tersebut sangat dipengaruhi dari pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk perempuan yang melek huruf dari tahun ke tahun sekaligus mengungkapkan bahwa kualitas SDM perempuan semakin meningkat. Peningkatan kualitas SDM perempuan memberi peluang kepada penduduk perempuan untuk dapat masuk dalam pasar kerja lebih berkualitas dengan gaji yang lebih memadai. Perolehan gaji yang semakin baik menunjukkan bahwa pendapatan perkapita penduduk perempuan semakin meningkat yang pada akhirnya secara total akan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Bertambahnya proporsi penduduk perempuan yang melek huruf juga mengungkapkan bahwa peluang penduduk perempuan untuk ikut dalam berbagai kegiatan keterampilan yang membutuhkan kepandaian membaca dan menulis semakin terbuka dan besar.

Pengaruh Kesetaraan gender Bidang Kesehatan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaruh kesetaraan gender bidang kesehatan (Kesetaraan Gender Harapan Hidup) terhadap perekonomian Kabupaten Musi Rawas adalah

tidak signifikan. Artinya, lama hidup penduduk perempuan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Musi Rawas melalui sumbangan pendapatan penduduk perempuan yang semakin lama waktunya ternyata tidak memberikan hasil secara maksimal.

Pengaruh Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan

Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan Kesetaraan dan Keadilan Gender bidang Ketenagakerjaan terhadap Perekonomian Kabupaten Musi Rawas. Penelitian menunjukkan, bahwa pengaruh kesetaraan gender bidang ketenagakerjaan terhadap perekonomian di Kabupaten Musi Rawas adalah tidak signifikan. Artinya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk perempuan belum member andil signifikan terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Musi Rawas.

Temuan Hasil Penelitian

1. Terdapat perbedaan temuan antara penelitian ini dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya (penelitian terdahulu) terutama untuk kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan. Contohnya penelitian untuk kabupatenkabupaten di Provinsi Lampung. Penelitian di Provinsi Lampung (untuk beberapa Kabupaten) terdapat hubungan yang signifikan antara kesetaraan gender bidang pendidikan dengan perekonomian daerah. Kasus ini berbeda dengan penelitian di Kabupaten Musi Rawas yang hasilnya tidak ada pengaruh signifikan antara kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan terhadap perekonomian daerah.

2. Penyebab perbedaan hasil antara kabupaten Musi Rawas dengan kabupatenkabupaten di Provinsi Lampung, salah satu penyebabnya adalah Angka Indeks Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan (IKKG Melek Huruf). Misalnya, IKKG Melek Huruf Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2004 adalah 0,65 sedangkan IKKG Melek Huruf Kabupaten Musi Rawas untuk tahun yang sama baru mencapai 0,20. Indeks Kesetaraan Gender yang makin tinggi (setara) mendekati angka satu akan lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Selain itu, ketidaksignifikanan hasil juga bisa disebabkan, perhitungan PDRB itu sendiri

tidak mengenal adanya gender. Perhitungan PDRB berdasarkan hasil dari seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Secara keseluruhan, hasil regresi menunjukkan bahwa, kesetaraan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Musi Rawas. Dalam model yang dikembangkan, pengaruh Kesetaraan dan Keadilan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan terhadap perekonomian Kabupaten Musi Rawas adalah positif tetapi tidak signifikan pada $(\alpha/2) = 5\%$.

Di sisi ketenagakerjaan, meski kesetaraan akses antara perempuan dan laki-laki telah terbuka luas, namun beberapa fakta tentang masih banyaknya buruh/pekerja perempuan yang tidak dibayar, adanya ketimpangan dalam hal upah antara perempuan dan laki-laki, maupun masih rendahnya latar belakang tingkat pendidikan perempuan dibanding laki-laki, merupakan faktor yang dapat menjelaskan kesetaraan gender dalam hal ketenagakerjaan belum dapat menjadi pemicu bagi perekonomian kabupaten Musi Rawas.

Secara jelas tampak bahwa, kesetaraan dan keadilan gender tidak hanya memberi manfaat bagi kaum perempuan namun bermanfaat pula bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya, pola fiki, perilaku, budaya, maupun kebijakan yang selama ini mendiskriminasi kaum perempuan perlu diubah. Membatasi akses perempuan terhadap sumberdaya pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, justru dapat mengurangi bahkan menghambat pembangunan ekonomi daerah.

Dalam perspektif pembangunan, pentingnya kesetaraan gender tidak hanya terbatas pada tujuan ekonomi belaka. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus memberdayakan penduduk, laki-laki dan perempuan, untuk memperoleh akses, berpartisipasi, miliki kontrol dan memperoleh manfaat yang sama dalam pembangunan.

Implikasi Hasil Penelitian

Memperhatikan tidak signifikannya pengaruh kesetaraan dan keadilan gender bidang Pendidikan terhadap perekonomian kabupaten Musi Rawas, maka ke depan pemerintah daerah harus lebih berupaya agar kualitas SDM penduduk perempuan semakin meningkat. Kesempatan bagi penduduk perempuan untuk memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada jalur pendidikan formal harus diberikan sebesar-besarnya.

Memperhatikan tidak signifikannya pengaruh Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Kesehatan (Kesetaraan Gender Harapan Hidup) memperlihatkan bahwa kesempatan yang diterima penduduk perempuan dalam kegiatan atau aktifitas ekonomi produktif masih rendah. Demikian pula kapasitas penduduk perempuan dalam kegiatan ekonomi belum diberikan secara optimal.

Memperhatikan tidak signifikannya pengaruh Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Ketenagakerjaan adalah tidak terlepas dari latar belakang pendidikan perempuan yang masih rendah, sehingga perempuan hanya jadi pekerja dengan upah yang rendah. Untuk itu, pemerintah harus lebih menggalakkan pendidikan dan membuka luas lapangan pekerjaan buat perempuan.

Permasalahan gender bukan persoalan bagi kaum perempuan, tetapi juga merupakan persoalan bersama, baik perempuan maupun laki-laki. Untuk menyelesaikan permasalahan gender secara lebih efektif, kegiatan-kegiatan sosialisasi atau pelatihan gender maupun bentuk-bentuk kegiatan lainnya dikalangan aparat dan masyarakat perlu melibatkan kedua pihak, perempuan dan laki-laki secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Naja, 2006, *Pendidikan Berkualitas dan Pembangunan SDM : Solusi Utama Masalah Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia*, Bisnis dan Ekonomi Politik, volume 7 Januari 2006, Universitas Indonesia Jakarta
- Agus Widarjono, 2005, *Ekonometrika : Teori dan aplikasi*, cetakan pertama, ekonoma, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

- Andarus Darahim, 2003, *Kendala Upaya Pembangunan Perempuan*, Yayasan Melati, www.menegpp
- Arum Atmawikarta, *Investasi Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi*, www.google.com
- Asian Development Bank, 1998, *Kebijakan ADB Mengenai Gender dan Pembangunan*, www.adb.org
- Baharudin Ilyas, 2004, *Pengaruh Tingkat Kesetaraan Gender dalam Keluarga Terhadap Fertilitas Rumah Tangga di Makasar*, Warga demografi, tahun ke-34 nomor 4, 2004, Lembaga Demografi, Universitas Indonesia, Jakarta
- Bappenas, 2004, *Laporan Pencapaian MDG Indonesia*, Bappenas, Jakarta www.bappenas.go.id
- , 2005, *Laporan Perkembangan Pencapaian MDG Indonesia Tahun 2005*, Bappenas, www.bappenas.go.id
- Bappeda Kab. Musi Rawas, 2010, *Musi Rawas dalam Angka 2010*, Bappeda, Kab. MURA Prov Sumsel.
- Biro Pusat Statistik, 2005, *Statistik Indonesia*, Jakarta, www.datastatistikindonesia.go.id
- , 2000-2009, *Statistik Kabupaten Musi Rawas*, BPS Kabupaten Musi Rawas.
- Dollar, David-Gatti, Roberta, 1999, *Gender Inequality, Income and Growth: Are good Times Good For Woman?*, Working Paper No.1, Policy Research Report, World Bank. www.worldbank.org
- Eko Bambang. S, 2004, *Otonomi Daerah Masih Mengesampingkan Peran Perempuan*, www.jurnalperempuan.com
- Esteve, Berta-Volart, 2004, *Gender Discrimination and growth: Theory and Evidence From India*, London School of Economics and Political science, UK www.Google.com
- Gujarati, Damodar. N, 2003, *Basic Econometrics*, 4th Edition, McGraw Hill, Singapore
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan R.I., *Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000*, Jakarta, www.menegpp.go.id
- Meutia hatta, 2005, *Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Mencapai Sasaran MDG*, sambutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan R.I. dalam Seminar Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, www.menegpp.go.id
- , 2007, *Diskriminasi Terhadap Perempuan Masih Terjadi*, Harian Suara Pembaharuan, 20 Februari 2007, www.menegpp.go.id
- Samosir-Rani Toersilaningsih, 2004, *Hubungan Antara Kesetaraan Gender, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Data SUSENAS 2000 dan 2002*, Warta Demografi, Tahun ke -34 Nomor 4, 2004, Lembaga Demografi, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sayuti Hasibuan, 1996, *Ekonomisumberdaya Manusia: Teori dan Kebijakan*, Cetakan Pertama, LP3ES, Universitas Indonesia, Jakarta
- Todaro, Michael P.- Smith, Stephan.C, 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta
- United Nations Development Program (UNDP), 2004, *Indeks Pembangunan Manusia*, www.undp.org
- , 2005, *Human Development Report*, www.undp.org
- World Bank, 2000, *Engendering Development: Through Gender Equality in Rights, Resources and Voices*. www.worldbank.org.id
- , 2002, *Integrating Gender Into the World Bank's Work: A Strategy for Action*, www.worldbank.org.id
- , 2007, *Global Monitoring Report: Promoting Gender Equality and Women's Empowerment*, www.worldbank.org. Id